

# **PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Kabupaten Bintan TAHUN 2023**



**TAHUN  
ANGGARAN  
2024**

# **Kata Pengantar**

## **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat hidayah- Nya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun 2023 telah selesai disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil perkembangan kependudukan ini disusun dengan menyajikan data statistik kependudukan

yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2023 yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data yang disediakan oleh SIAK telah dikonsolidasi secara Nasional dan telah dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Publikasi Profil Perkembangan Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi (Pemilu dan Pilkada), penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta untuk keperluan lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Profil ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan berbagai sumber

yang belum maksimal. Untuk itu kami menerima saran, masukan dan kritikan demi penyempurnaan Buku Profil di masa yang akan datang.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penerbitan buku profil ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Bandar Seri Bentan, 15 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN



RUSLI, ST

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 197803062006041011

# DAFTAR ISI

	Hal.
<b>SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....</b>	<b>172</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu isu strategis dari pembangunan suatu wilayah adalah isu kependudukan. Isu kependudukan bersifat lintas sektor, bukan saja berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk saja, isu kependudukan juga berhubungan dengan pengintegrasian berbagai aspek kedalam perencanaan pembangunan dan pencapaian pembangunan kependudukan itu sendiri. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas

penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Dengan demikian data kependudukan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai pada data *by name by address* menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang

berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dan tepat sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan



keluarga. Data dan informasi tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan

untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”. Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai data kependudukan ini perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dibuat untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di Daerah, serta prospek kependudukan dimasa yang akan datang. Disisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengacu kepada hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

## **B. Tujuan**

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Kabupaten Bintan Tahun 2023 sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan khususnya bagi stakeholder di Kabupaten Bintan, dan umumnya

bagi seluruh pihak yang memerlukan data terkait dengan perkembangan kependudukan di Kabupaten Bintan dalam bentuk ikhtisar meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun 2023 adalah:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi; dan
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

### **D. Ketentuan Umum**

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di



Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-



orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semester, yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota



yang telah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

8. Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau



surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa





kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);

14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992);
16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi



derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No 52 Tahun 2009);

17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010);
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal



tetap (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
20. Kematian atau mortalitas menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
21. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya



dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;

22. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);

23. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);

24. Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif



(migrasi internal) atau batas politik/negara  
(migrasi internasional);

25. Mobilitas Penduduk Non Permanen (*circuclation/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik melaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
26. Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
27. Mobilitas Penduduk Ulang Alik atau *nglaju* (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;



28. Migrasi Kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
29. Migrasi Semasa Hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi di mana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
30. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (Desa/Kec/Kab/Kota/Provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;



32. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk dipertanian dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
33. Penduduk Usia Kerja (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
34. Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha;
35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;



36. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/ survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
37. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
38. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
39. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
40. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28





minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;

41. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk;
42. Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*) banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun;
43. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
44. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;



45. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
46. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*) adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
47. Pengeluaran Untuk Makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
48. Angka Partisipasi Kasar /APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk



kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;

49. Angka Partisipasi Murni/APM adalah persentase jumlah peserta didik Sekolah Dasar usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
50. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan

demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat**

Kabupaten Bintan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Melayu dan perdagangan di Asia Tenggara. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Bintan telah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di jalur laut antara India dan Tiongkok. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Johor-Riau, yang berperan besar dalam mengendalikan perniagaan di Selat Malaka. Bintan juga sering kali menjadi basis pertahanan kerajaan Melayu dalam menghadapi invasi kekuatan kolonial Eropa seperti Portugis dan Belanda. Keberadaan benteng-

benteng pertahanan di sekitar wilayah pesisir menjadi saksi sejarah pentingnya Bintan pada masa itu.

Selama masa kolonial, Bintan sering menjadi arena perebutan kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Riau-Lingga yang dikuasai Belanda setelah perjanjian dengan Inggris di tahun 1824. Kedekatan Bintan dengan Singapura menjadikannya salah satu kawasan yang strategis bagi kolonial dalam mengendalikan perdagangan dan rute maritim. Namun, di sisi lain, Bintan juga dikenal sebagai tempat perlindungan bagi para pejuang Melayu yang menentang kekuasaan kolonial, sehingga pulau ini menyimpan banyak jejak perlawanan rakyat lokal.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Bintan masuk ke dalam Provinsi Riau sebelum akhirnya menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang

terbentuk pada tahun 2002. Dalam perkembangan modern, Bintan mengalami transformasi ekonomi besar, terutama dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan pengembangan pariwisata di daerah Lagoi. Keindahan pantai dan alamnya menarik wisatawan internasional, terutama dari Singapura. Meski kini dikenal sebagai destinasi wisata, Bintan tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya yang kaya, menjadi penghubung masa lalu kerajaan Melayu hingga zaman modern yang penuh dinamika.

## **B. Letak Geografis**

Kabupaten Bintan terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan pusat administrasi di Bandar Seri Bentan yang berada di Kecamatan Teluk Bintan. Secara geografis, kabupaten ini terdiri dari sejumlah pulau, dengan Pulau Bintan sebagai pulau terbesar. Lokasinya yang berada di perairan strategis antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadikannya penting sebagai

pusat perdagangan dan lalu lintas maritim internasional. Selain itu, kedekatan Kabupaten Bintan dengan Singapura, yang hanya sekitar 45 menit perjalanan feri, menambah nilai strategis wilayah ini, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi.

Wilayah Kabupaten Bintan terletak relatif di bagian Tengah wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan secara geografis terletak antara 0°6'17" Lintang Utara – 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur sebelah barat – 108°2'27" Bujur Timur disebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan Negara Malaysia;
- Sebelah Timur: Provinsi Kalimantan Barat;
- Sebelah Selatan: Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;



- Sebelah Barat: Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Ruang wilayah daratan Kabupaten Bintan terletak pada pulau utama (*mainland*) Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitar pulau utama tersebut. Pada pulau utama Pulau Bintan tersebut terdapat juga wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan demikian secara umum ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah berupa kepulauan dengan satu pulau utama yaitu Pulau Bintan.

Di antara pulau-pulau yang membentuk wilayah Kabupaten Bintan ini terdapat gugusan pulau-pulau yang relatif jauh jaraknya dari pulau utama Pulau Bintan, yaitu gugusan pulau-pulau di Kecamatan Tambelan yang wilayahnya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jarak relatif menurut garis lurus antara sisi timur Pulau Bintan dengan Pulau Tambelan, sebagai pulau utama di Kecamatan Tambelan, adalah kurang lebih 326 km

atau 176 mil laut (nautical miles). Berdasarkan data dari publikasi Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2022, jumlah pulau yang ada dan telah bernama adalah sejumlah 240 pulau (termasuk pulau terbesar yaitu Pulau Bintan). Dari ke-240 pulau tersebut, sebanyak 39 pulau telah berpenghuni dan sejumlah 201 pulau tidak/belum berpenghuni.

Dari segi morfologi, Kabupaten Bintan memiliki topografi yang beragam, dengan kawasan pantai, dataran rendah, hingga bukit-bukit kecil yang tersebar di beberapa titik pulau. Pulau Bintan sendiri memiliki sejumlah perbukitan, seperti Gunung Bintan, yang merupakan puncak tertinggi di wilayah ini dengan ketinggian sekitar 340 meter di atas permukaan laut. Daerah pesisirnya berupa hamparan pantai berpasir putih dan dataran landai yang sering dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan kegiatan ekonomi seperti perikanan. Selain itu, bagian timur Pulau Bintan

juga memiliki kawasan hutan tropis yang masih lestari, menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna.

Iklim di Kabupaten Bintan adalah tropis dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan cukup tinggi terutama pada bulan Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau biasanya berlangsung antara April hingga September. Suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 32°C sepanjang tahun. Angin muson yang bertiup dari Laut Cina Selatan juga mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah ini, terutama di kawasan pesisir. Iklim yang stabil ini mendukung sektor pertanian, perkebunan, serta pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bintan.

Kabupaten Bintan memiliki luas secara keseluruhan sebesar 87.717,84 km<sup>2</sup> yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km<sup>2</sup> (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km<sup>2</sup>

(98,50%). Secara administrasi, wilayah Kabupaten Bintan terdiri atas sepuluh kecamatan, yang terbagi lagi atas 36 Desa dan 15 Kelurahan, atau total 51 Desa/Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Gunung Kijang, terdiri dari satu kelurahan dan tiga desa, yaitu Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat, dan Desa Teluk Bakau.
2. Kecamatan Bintan Timur, yang terdiri dari empat kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Enam, Kelurahan Sungai Lekop.
3. Kecamatan Bintan Utara, yang terdiri dari empat kelurahan dan satu desa, yaitu Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kelurahan Tanjung Uban Utara, dan Desa Lancang Kuning.
4. Kecamatan Teluk Bintan, yang terdiri dari satu kelurahan dan lima desa, yaitu Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Bintan Buyu, Desa



Pangkil, Desa Penaga, Desa Pengujan, Desa Tembeling.

5. Kecamatan Tambelan, yang terdiri dari satu kelurahan dan tujuh desa, yaitu Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Batu Lepuk, Desa Kampung Hilir, Desa Kampung Melayu, Desa Kukup, Desa Pengikik, Desa Mentebung, dan Desa Pulau Pinang.
6. Kecamatan Teluk Sebong, yang terdiri dari satu kelurahan dan enam desa, yaitu Kelurahan Kota Baru, Desa Berakit, Desa Ekan Aculai, Desa Pengudang, Desa Sebong Lagoi, Desa Sebong Pereh, dan Desa Sri Bintan.
7. Kecamatan Toapaya, yang terdiri dari satu kelurahan dan tiga desa, yaitu Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya, Desa Toapaya Selatan, dan Desa Toapaya Utara.
8. Kecamatan Mantang, yang terdiri dari empat desa, yaitu Desa Dendun, Desa Mantang Baru, Desa Mantang Besar, dan Desa Mantang Lama.

9. Kecamatan Bintan Pesisir, yang terdiri dari empat desa, yaitu Desa Air Glubi, Desa Kelong, Desa Mapur, dan Desa Numbing.
10. Kecamatan Seri Kuala Lobam, yang terdiri dari dua kelurahan dan tiga desa, yaitu Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Teluk Lobam, Desa Busung, Desa Kuala Sempang, dan Desa teluk Sasah.

Setiap kecamatan di Kabupaten Bintan memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Kecamatan Teluk Bintan, misalnya, terletak di bagian tengah Pulau Bintan dengan lanskap yang didominasi oleh dataran rendah dan beberapa kawasan hutan. Di sisi lain, Kecamatan Gunung Kijang di bagian timur memiliki pantai panjang dengan hamparan pasir putih serta bukit-bukit kecil di pedalaman. Kecamatan Tambelan, yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil di barat daya, memiliki karakteristik morfologi yang unik, dengan pulau-

pulau berbukit dan terpisah oleh perairan laut yang luas.

Topografi Kabupaten Bintan secara keseluruhan terdiri dari dataran rendah di sepanjang pesisir, perbukitan di bagian dalam pulau, dan daerah pesisir yang kaya dengan terumbu karang serta ekosistem laut lainnya. Dataran rendah ini sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dan pemukiman penduduk. Di wilayah pesisir, terutama di sekitar kawasan wisata seperti Lagoi, topografi landai dan pantai-pantai yang panjang menjadikan area ini ideal untuk pembangunan resor dan kegiatan wisata bahari. Sebaliknya, wilayah perbukitan seperti di sekitar Gunung Bintan menjadi tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memberikan peluang bagi ekowisata.

Dengan kondisi geografis yang beragam, Kabupaten Bintan memiliki potensi yang besar

dalam berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perikanan, pertanian, hingga industri. Lokasi strategis yang berada di jalur pelayaran internasional serta keindahan alam yang luar biasa menjadikan Bintan sebagai salah satu destinasi utama di Kepulauan Riau, sekaligus sebagai wilayah yang penting secara ekonomi dan maritim.

### **C. Gambaran Umum Demografi**

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki keragaman demografis baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya, Bintan menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, seperti Melayu, Jawa, Bugis, Batak, dan Tionghoa. Mayoritas penduduk Bintan adalah suku Melayu, yang juga memengaruhi kebudayaan dan bahasa sehari-hari di wilayah ini. Namun, dengan adanya migrasi dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa dan Sulawesi,



komposisi penduduknya menjadi semakin beragam.

Agama mayoritas yang dianut penduduk Kabupaten Bintan adalah Islam, sejalan dengan dominasi suku Melayu yang merupakan pemeluk agama ini. Selain Islam, ada juga penduduk yang menganut agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, yang sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa dan pendatang dari daerah lain. Toleransi antaragama di Bintan cukup tinggi, dan kerukunan antara kelompok agama ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang harmonis.

Distribusi penduduk di Kabupaten Bintan tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi berada di kawasan yang lebih berkembang secara ekonomi, seperti Kecamatan Bintan Timur dan Bintan Utara. Kedua kecamatan ini memiliki infrastruktur yang lebih baik, akses ke pusat perdagangan, serta

fasilitas umum yang lebih lengkap, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Daerah lain seperti Tambelan dan Mantang memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah karena karakteristik geografisnya yang berupa pulau-pulau kecil dan lebih terisolasi dari pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Dari segi pendidikan, Kabupaten Bintan telah mengalami peningkatan dalam hal akses terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Banyak sekolah negeri dan swasta yang tersebar di berbagai kecamatan, meskipun di beberapa daerah terpencil, seperti Tambelan, akses ke fasilitas pendidikan lebih terbatas. Tingkat melek huruf di Kabupaten Bintan cukup tinggi, seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Dalam hal ekonomi, sebagian besar penduduk Kabupaten Bintan masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, petani, atau bekerja di sektor pariwisata yang berkembang pesat, terutama di daerah Lagoi, Bintan Utara. Ekonomi maritim memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk, khususnya di wilayah pesisir. Di daerah pedalaman, sebagian besar penduduk mengandalkan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diversifikasi ekonomi yang mulai berkembang, terutama dengan adanya kawasan industri seperti Bintan Industrial Estate (BIE), juga memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk bekerja di sektor manufaktur dan jasa.

Secara keseluruhan, demografi Kabupaten Bintan mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal Melayu dan pengaruh dari berbagai budaya yang datang melalui migrasi. Keragaman ini

menciptakan dinamika sosial dan budaya yang kaya, serta memberikan kekuatan pada Bintan sebagai wilayah yang terus berkembang dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

#### **D. Kondisi Pengembangan Ekonomi**

Pengembangan ekonomi Kabupaten Bintan hingga tahun 2023 memperlihatkan berbagai kemajuan signifikan di berbagai sektor utama. Terletak di wilayah yang strategis, yaitu di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, Bintan telah memanfaatkan posisinya sebagai jalur perdagangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bintan, bersama dengan pemerintah pusat, terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi wilayah ini melalui investasi dalam infrastruktur, kawasan industri, dan sektor-sektor produktif lainnya. Salah satu program andalan adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, yang dirancang untuk menarik

investasi asing dan meningkatkan sektor manufaktur serta pariwisata.

Sektor pariwisata tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Bintan. Hingga tahun 2023, kawasan Lagoi di Bintan Utara terus menjadi magnet bagi wisatawan internasional, khususnya dari Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Resor-resor mewah, lapangan golf kelas dunia, dan pantai-pantai indah menjadi daya tarik utama. Dengan infrastruktur yang terus ditingkatkan, seperti akses transportasi laut dan jalan raya, Bintan semakin mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Asia Tenggara. Selain Lagoi, kawasan wisata Pantai Trikora di Bintan Timur dan objek wisata alam seperti Gurun Pasir Busung juga semakin populer, menjadikan pariwisata sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian daerah.

Pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan investor asing untuk mengembangkan berbagai fasilitas pariwisata baru, termasuk resor ramah lingkungan dan wisata bahari. Upaya ini mencerminkan komitmen Bintan dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan pariwisata ini juga berdampak langsung pada peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, yang banyak terlibat dalam sektor perhotelan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya.

Selain pariwisata, industri manufaktur juga menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Kabupaten Bintan. Kawasan Industri Bintan di Kecamatan Seri Kuala Lobam terus berkembang, dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor elektronik, tekstil, dan kimia. Hingga tahun 2023, investasi asing di kawasan ini meningkat,

dengan sejumlah perusahaan multinasional yang membuka pabrik-pabrik baru. Kawasan ini telah menyerap ribuan tenaga kerja lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di wilayah Bintan. Keberadaan Pelabuhan Sri Bayintan Kijang juga memperkuat konektivitas antara Bintan dan pasar internasional, mempermudah arus ekspor hasil industri dan barang-barang manufaktur.

Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan. Hingga tahun 2023, sektor perikanan di Bintan terus diperkuat melalui modernisasi alat tangkap dan pelatihan bagi nelayan setempat untuk meningkatkan produktivitas. Perikanan tangkap, budidaya ikan, dan pengolahan hasil laut menjadi andalan bagi beberapa kecamatan seperti Mantang dan Tambelan. Di sisi lain, pertanian di Bintan juga terus berkembang, dengan komoditas utama

seperti karet, kelapa, dan hasil pertanian hortikultura. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan serta cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim.

Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, pemerintah daerah terus berinvestasi dalam infrastruktur. Jalan raya yang menghubungkan berbagai kecamatan di Pulau Bintan terus diperbaiki, dan fasilitas transportasi seperti pelabuhan diperluas untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang. Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah juga memainkan peran penting dalam mendukung pariwisata dan bisnis, dengan peningkatan frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang menghubungkan Bintan dengan kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara tetangga.

Namun, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan di berbagai sektor, Kabupaten Bintan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah



satunya adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata dan industri, yang membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi global. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun sebelumnya memberikan pelajaran penting, di mana penurunan tajam jumlah wisatawan mempengaruhi pendapatan daerah dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Hingga tahun 2023, Kabupaten Bintan berada di jalur yang baik untuk terus berkembang, dengan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, industri, perikanan, dan pertanian yang berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Tantangan yang dihadapi, seperti ketergantungan pada sektor tertentu dan peningkatan sumber daya manusia, masih memerlukan perhatian khusus. Namun, dengan komitmen pemerintah

daerah dan dukungan dari berbagai pihak, Bintan memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi dan pariwisata terdepan di Indonesia, terutama di wilayah barat Indonesia dan Kepulauan Riau.

### **E. Potensi Daerah**

Kabupaten Bintan memiliki berbagai potensi daerah yang signifikan di berbagai sektor, menjadikannya salah satu wilayah strategis di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis yang berada di jalur pelayaran internasional antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadikan Bintan sebagai titik strategis bagi perdagangan dan transportasi maritim. Selain kedekatannya dengan Singapura, Bintan juga dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Potensi geografis ini memberikan peluang besar dalam pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Salah satu potensi terbesar Kabupaten Bintan terletak pada sektor pariwisata. Dengan keindahan alamnya yang menawan, Bintan memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan seperti kawasan Lagoi yang terkenal dengan resor mewah, pantai-pantai eksotis, dan lapangan golf bertaraf internasional. Selain itu, kawasan pantai seperti Pantai Trikora dan Gurun Pasir Busung juga semakin dikenal sebagai destinasi wisata menarik, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi wisata alam dan budaya ini terus dikembangkan dengan dukungan infrastruktur yang semakin membaik, seperti pelabuhan dan bandara yang mendukung aksesibilitas wisatawan ke Bintan.

Sektor industri juga menjadi potensi besar yang terus berkembang di Kabupaten Bintan. Kawasan Industri Bintan (Bintan Industrial Estate) di Kecamatan Seri Kuala Lobam telah menjadi pusat bagi berbagai industri manufaktur, seperti

elektronik, tekstil, dan produk kimia. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang juga memberikan peluang besar bagi investasi asing di sektor industri berat dan pengolahan mineral, khususnya bauksit. Keberadaan kawasan industri ini menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi penduduk lokal dan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Selain itu, Kabupaten Bintan memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Dengan wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya laut, Bintan menjadi salah satu daerah penghasil ikan dan hasil laut lainnya di Kepulauan Riau. Banyak penduduk di kecamatan-kecamatan pesisir seperti Mantang dan Tambelan menggantungkan hidup dari perikanan tangkap dan budidaya ikan. Potensi perikanan ini terus dikembangkan melalui modernisasi alat tangkap dan pengembangan teknologi budidaya ikan yang



lebih efisien. Hasil laut dari Bintan juga berpotensi untuk diekspor ke pasar internasional, mengingat tingginya permintaan global terhadap produk perikanan.

Di sektor pertanian, meskipun Bintan lebih dikenal sebagai wilayah maritim, potensi pertanian juga cukup besar di beberapa daerah dengan lahan subur. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kelapa, karet, dan hortikultura. Wilayah seperti Toapaya dan Teluk Bintan memiliki lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan. Meskipun sektor ini belum berkembang sebesar sektor industri dan pariwisata, potensinya masih besar terutama jika didukung dengan inovasi teknologi pertanian dan pengelolaan lahan yang lebih efisien.

Sumber daya alam lainnya di Kabupaten Bintan juga memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut. Potensi tambang bauksit,

terutama di wilayah Galang Batang, telah menarik minat investor lokal dan internasional. Selain itu, potensi untuk mengembangkan energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya, semakin meningkat dengan tren global menuju keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Potensi daerah Kabupaten Bintan yang beragam di berbagai sektor memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam memaksimalkan potensi-potensi ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi, Kabupaten Bintan memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi

salah satu pusat ekonomi utama di Indonesia, terutama di sektor maritim, industri, dan pariwisata. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang bijak, potensi Bintan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakatnya.

## **BAB III**

### **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

#### **A. Kuantitas Penduduk**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

#### **1. Jumlah dan Sebaran Penduduk**

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 175.873 jiwa, yang terbagi





atas penduduk laki-laki sebanyak 90.148 jiwa (51,26%) dan perempuan sebanyak 85.725 jiwa (48,74%). Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 171.730 jiwa. Sehingga dalam satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Bintan mengalami peningkatan sebanyak 4.143 jiwa atau naik sebesar 2,41%. Sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah daratan yang cukup besar, tidak lantas menjadi keuntungan bagi Kabupaten Bintan, karna pada dasarnya persebaran penduduk di Kabupaten Bintan merupakan satu permasalahan yang harus dihadapi.

Persebaran penduduk di Kabupaten Bintan cukup timpang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Populasi penduduk terpusat pada beberapa daerah sementara daerah lainnya persebaran dan kepadatannya lebih rendah. Wilayah-wilayah yang berbatasan



dengan Kota Tanjungpinang, memiliki pelabuhan, objek wisata, dan tempat industri, merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudahan akses juga menjadikan wilayah-wilayah tersebut banyak dikunjungi dan menjadi tempat tinggal favorit di Kabupaten Bintan.

Untuk melihat jumlah dan sebaran penduduk di Kabupaten Bintan, ada baiknya dibahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebaran penduduk dapat dilihat dari proporsi penduduk, kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan laju pertumbuhan penduduk. Data di bawah ini menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di Kabupaten Bintan.



## **a. Jumlah dan Proporsi Penduduk**

### **Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk di Kabupaten Bintan dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai sarana dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan jenis kelamin dari penduduk yang ada. Tabel 3.1. memperlihatkan jumlah penduduk pada setiap kecamatan Kabupaten Bintan yang didasarkan pada proporsi penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Jumlah dan Proporsi Penduduk**  
**Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Kijang	9.078	5,16	8.505	4,84	17.583	10,00
2	Bintan Timur	25.881	14,72	24.591	13,98	50.472	28,70
3	Bintan Utara	12.583	7,15	12.358	7,03	24.941	14,18
4	Teluk Bintan	6.164	3,50	5.711	3,25	11.875	6,75
5	Tambelan	2.690	1,53	2.538	1,44	5.228	2,97
6	Teluk Sebong	10.074	5,73	9.484	5,39	19.558	11,12
7	Toapaya	7.530	4,28	7.111	4,04	14.641	8,32
8	Mantang	2.437	1,39	2.175	1,24	4.612	2,62
9	Bintan Pesisir	3.667	2,09	3.348	1,90	7.015	3,99
10	Seri Kuala Lobam	10.044	5,71	9.904	5,63	19.948	11,34
KABUPATEN BINTAN		90.148	51,26	85.725	48,74	175.873	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bintan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dapat disebabkan oleh



beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah adanya sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja fisik, seperti industri pariwisata, perkapalan, perikanan, dan pertambangan, yang umumnya lebih banyak mempekerjakan laki-laki. Kabupaten Bintan memiliki kawasan ekonomi khusus dan daerah industri yang menarik pekerja dari luar, yang sebagian besar adalah laki-laki.

Selain itu, migrasi kerja dari daerah lain ke Bintan, terutama pekerja laki-laki yang datang tanpa membawa keluarganya, juga bisa memperbesar disparitas jumlah laki-laki dan perempuan. Di beberapa daerah, faktor budaya dan tradisi juga bisa mempengaruhi distribusi penduduk, di mana laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan di luar rumah atau merantau ke daerah dengan peluang kerja yang lebih



tinggi. Hal ini secara alami menyebabkan jumlah laki-laki lebih dominan dalam struktur penduduk dibandingkan perempuan.

### **b. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.

Pada tabel 3.2 di bawah memperlihatkan kepadatan penduduk Kabupaten Bintan bahwa dengan luas 1.320,11 km<sup>2</sup> dihuni oleh 175.873 jiwa atau per km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 133 jiwa.

Tabel 3.2

Jumah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah <sup>2</sup> (Km )	Kepadatan <sup>2</sup> (jiwa/Km )
		Jumlah	Persentase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gunung Kijang	17.583	10,00	192,63	91,28
2	Bintan Timur	50.472	28,70	100,14	504,01
3	Bintan Utara	24.941	14,18	43,24	576,80
4	Teluk Bintan	11.875	6,75	125,44	94,67
5	Tambelan	5.228	2,97	90,25	57,93
6	Teluk Sebong	19.558	11,12	294,24	66,47
7	Toapaya	14.641	8,32	176,50	82,95
8	Mantang	4.612	2,62	63,68	72,42
9	Bintan Pesisir	7.015	3,99	116,19	60,38
10	Seri Kuala Lobam	19.948	11,34	117,80	169,34
KABUPATEN BINTAN		175.873	100,00	1.320,11	133,23

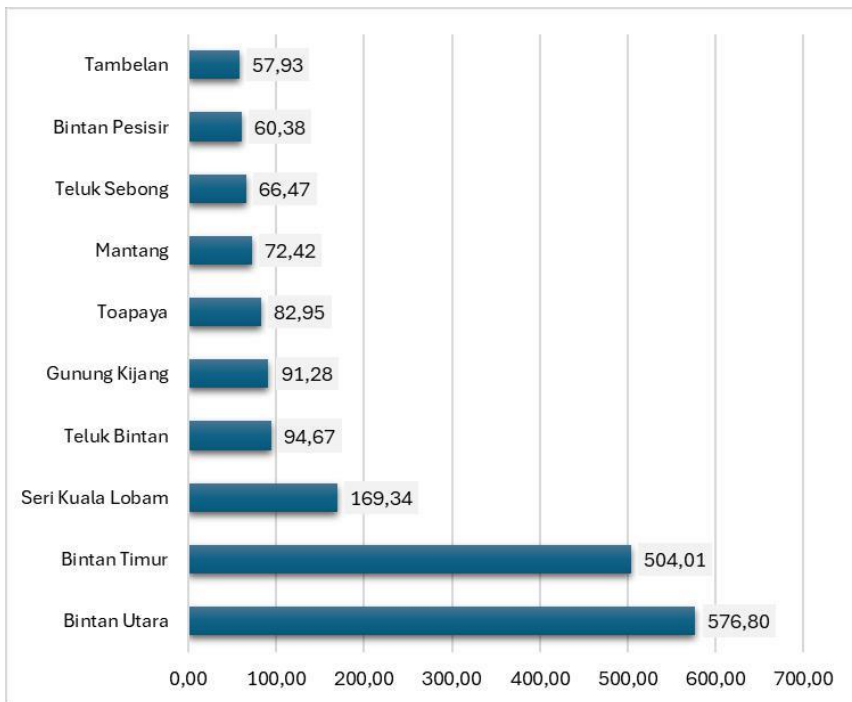
Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

Persebaran penduduk di Kabupaten Bintan apabila dilihat dari setiap kecamatannya, terlihat bahwa Kecamatan Bintan Utara merupakan wilayah dengan kepadatan



penduduk tertinggi di Kabupaten Bintan, yaitu 576,80 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul dengan Kecamatan Bintan Timur dengan kepadatan sebesar 504,01 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan kepadatan sebesar 169,34 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, wilayah dengan memiliki kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Bintan adalah Kecamatan Tambelan, yaitu 57,93 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bintan dari yang terendah hingga tertinggi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:





**Gambar 3.1**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk di suatu daerah. Faktor utama adalah kelahiran. Jika banyak kelahiran yang terjadi, maka



semakin padat juga kondisi di suatu daerah. Faktor kedua adalah ekonomi. Sebagian besar daerah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dari daerah lain. Hal ini ditentukan dari seberapa banyak tempat industri, peluang kerja, dan jumlah pendapatannya. Faktor yang ketiga adalah letak geografis wilayah tersebut. Wilayah yang letaknya cukup jauh dari pusat kota, apabila tidak disertai dengan infrastruktur yang mendukung sebagai akses keluar masuk wilayah tersebut, tentu mempengaruhi preferensi penduduk untuk memutuskan bertempat tinggal di wilayah tersebut.

### **c. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Dimana



pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus, jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi di sisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk, Dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*in migration* dan keluar/*out migration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan

alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (*net migration*).

LPP tentunya tidak terlepas dari membandingkan jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah dalam beberapa tahun. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan, dapat dilihat dengan melihat jumlah penduduk dalam beberapa tahun. Tabel 3.3 memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten Bintan dalam empat tahun terakhir sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan**  
**Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan,**  
**2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			LPP
		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2019	79.880	75.576	155.456	-
2	2020	83.071	78.819	161.890	4,14
3	2021	86.565	82.189	168.754	4,24
4	2022	87.992	83.738	171.730	1,76
5	2023	90.148	85.725	175.873	2,41

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mengalami pertambahan sebanyak 20.417 jiwa dalam jangka waktu empat tahun. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- i. Migrasi Masuk. Bintan memiliki kawasan industri, pariwisata, dan ekonomi khusus



yang berkembang pesat, yang menarik banyak pekerja dari luar daerah. Migrasi masuk, terutama untuk mencari pekerjaan, menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan jumlah penduduk. Para pekerja, baik dari daerah lain di Indonesia maupun luar negeri, datang untuk bekerja di sektor-sektor seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, dan manufaktur.

- ii. Pertumbuhan alami. Pertambahan penduduk secara alami juga terjadi karena adanya tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian. Di Bintan, jika angka kelahiran tetap stabil atau meningkat, ini akan mendorong pertumbuhan penduduk. Program kesehatan yang lebih baik juga bisa berkontribusi pada menurunnya angka kematian, sehingga jumlah penduduk bertambah.



- iii. Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi. Perkembangan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik, mendorong kemajuan ekonomi yang menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal di Bintan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mempromosikan investasi dan pembangunan kawasan industri juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menarik pendatang baru.
- iv. Peningkatan Pariwisata. Sebagai salah satu tujuan pariwisata di Kepulauan Riau, Bintan terus mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Beberapa dari mereka mungkin memutuskan untuk tinggal lebih lama atau bahkan menetap, terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan.



Kombinasi dari migrasi, pertumbuhan alami, dan pengembangan ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama pertambahan penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.

## **2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu Menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Dalam bidang kesehatan, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kelompok bayi dan balita lebih





membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan Kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan Kesehatan yang lebih intensif. Tabel 3.4 memperlihatkan penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bintang Tahun 2023**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Total	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0 - 4	6.806	7,55	6.267	7,31	13.073	7,43
2	5 - 9	8.062	8,94	7.658	8,93	15.720	8,94
3	10 - 14	8.929	9,90	8.299	9,68	17.228	9,80
4	15 - 19	7.519	8,34	7.287	8,50	14.806	8,42
5	20 - 24	7.992	8,87	7.412	8,65	15.404	8,76
6	25 - 29	6.700	7,43	6.430	7,50	13.130	7,47
7	30 - 34	6.229	6,91	6.054	7,06	12.283	6,98
8	35 - 39	6.702	7,43	6.889	8,04	13.591	7,73
9	40 - 44	7.691	8,53	8.137	9,49	15.828	9,00
10	45 - 49	7.002	7,77	6.519	7,60	13.521	7,69
11	50 - 54	5.788	6,42	4.824	5,63	10.612	6,03
12	55 - 59	4.115	4,56	3.401	3,97	7.516	4,27
13	60 - 64	2.853	3,16	2.547	2,97	5.400	3,07
14	65 - 69	1.702	1,89	1.755	2,05	3.457	1,97
15	70 - 74	992	1,10	1.080	1,26	2.072	1,18
16	75+	1.066	1,18	1.166	1,36	2.232	1,27
KABUPATEN BINTAN		90.148	100,00	85.725	100,00	175.873	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintang



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Bintan paling banyak berada di kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 17.228 jiwa, dan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.072 jiwa.

#### **a. Rasio Jenis Kelamin (RJK)**

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. RJK dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah. RJK pun dapat melihat



perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, suatu daerah dengan RJK yang berbeda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan RJK ini, maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini. Tabel 3.5 memperlihatkan Rasio jenis kelamin berdasarkan Kecamatan sebagai berikut:



**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin per**  
**Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gunung Kijang	9.078	8.505	17.583	107
2.	Bintan Timur	25.881	24.591	50.472	105
3.	Bintan Utara	12.583	12.358	24.941	102
4.	Teluk Bintan	6.164	5.711	11.875	108
5.	Tambelan	2.690	2.538	5.228	106
6.	Teluk Sebong	10.074	9.484	19.558	106
7.	Toapaya	7.530	7.111	14.641	106
8.	Mantang	2.437	2.175	4.612	112
9.	Bintan Pesisir	3.667	3.348	7.015	110
10.	Seri Kuala Lobam	10.044	9.904	19.948	101
KABUPATEN BINTAN		90.148	85.725	175.873	105

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bintan sebesar 105, yang berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Bintan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin di



Kabupaten Bintan pada tahun 2023 ini tidak berbeda jauh dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2022. Rasio jenis kelamin penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mantang, dimana setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 112 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan, jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan.

## **b. Piramida Penduduk**

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida



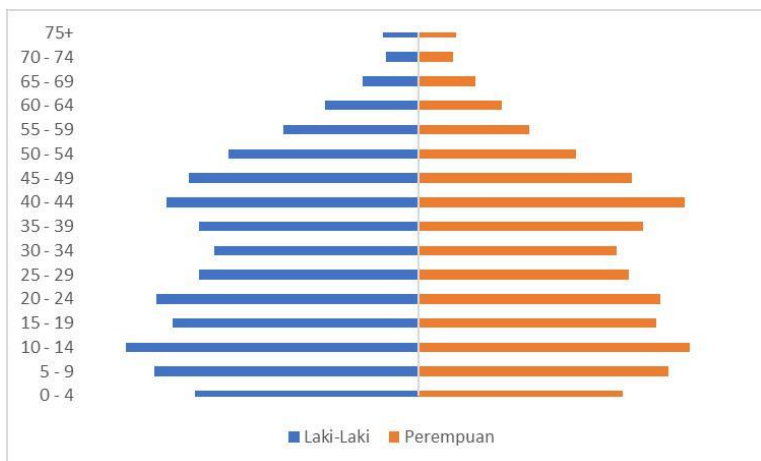
dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan. Kabupaten Bintan menunjukkan struktur penduduk muda/*expansive*, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya.

Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Piramida penduduk Kabupaten Bintan juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan piramida yang menunjukkan lebih banyak di kelompok usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun, maka dalam jangka 15 sampai 20 tahun Pemerintah harus mampu merencanakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut yang telah menjadi kelompok penduduk yang produktif.

Piramida penduduk ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun akan ada banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan sosialisasi tentang demokrasi. Gambar 3.2 adalah piramida penduduk Kabupaten Bintan tahun 2023.





**Gambar 3.2**  
**Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bintan**

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Dari bentuk piramida di atas, dapat dipastikan Kabupaten Bintan masih didominasi penduduk usia muda. Khususnya kelompok umur 10-14 tahun menempati urutan pertama yakni 9,90% atau sebanyak 17.228 jiwa. Disisi lain kelompok 0-4 tahun mulai berkurang, diduga kecenderungan angka kelahiran mulai menurun, sedangkan kelompok 5-9

tahun lebih banyak dibanding dengan kelompok dibawahnya. Dapat dikatakan angka kematian bayi di Kabupaten Bintan pun memiliki kecenderungan menurun. Namun hal ini perlu didukung dengan data yang lebih akurat, mengingat pelaporan lahir mati masih cenderung rendah.

Selain itu, yang perlu dicermati adalah kelompok usia sekolah menengah adalah mulai dari usia 10-14 tahun yang merupakan asset atau modal manusia Kabupaten Bintan untuk menjawab tantangan pembangunan 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Perlu persiapan yang komprehensif antara sektor pendidikan dan sector ketenagakerjaan, agar hal tersebut tidak menjadi beban pembangunan dimasa yang akan datang.



### c. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut tergolong kedalam negara maju atau sedang berkembang. Angka DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk pada usia produktif (usia 15 - 64 tahun) yaitu untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas), sedang DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum

produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Tabel 3.6 di bawah ini menunjukkan data DR di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.

**Tabel 3.6**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten**  
**Bintan Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan
		Usia Muda (0-14)	Usia Produktif (15 - 64)	Usia Tua (65+)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gunung Kijang	4.902	12.036	645	46,09
2.	Bintan Timur	12.665	35.296	2.511	43,00
3.	Bintan Utara	6.162	17.551	1.228	42,11
4.	Teluk Bintan	3.065	8.045	765	47,61
5.	Tambelan	1.344	3.615	269	44,62
6.	Teluk Sebong	5.171	13.625	762	43,54
7.	Toapaya	3.787	10.171	683	43,95
8.	Mantang	1.251	3.193	168	44,44
9.	Bintan Pesisir	1.852	4.855	308	44,49
10.	Seri Kuala Lobam	5.822	13.704	422	45,56
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>46.021</b>	<b>122.091</b>	<b>7.761</b>	<b>44,05</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Tabel di atas menggambarkan komposisi penduduk produktif dan non produktif sebagai dasar perhitungan rasio ketergantungan (DR) Kabupaten Bintan, yang apabila dimasukkan pada formula di bawah ini:

$$DR = \frac{\text{Penduduk Usia Muda} + \text{Penduduk Usia Tua}}{\text{Usia Produktif}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah angka DR Kabupaten Bintan pada tahun 2023:

$$DR = \frac{46.021 + 7.761}{122.091} \times 100\% = \mathbf{44,05}$$

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia 65 tahun



keatas juga dianggap tidak produktif lagi, karena sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 65 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bintan secara umur sebesar 44,05 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan, menanggung  $\pm 44$  orang usia non produktif baik anak-anak maupun manula. Angka ini terbilang cukup rendah karena masih di bawah 50. Usia penduduk tua ( $>65$  tahun)



secara persentase terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bintan sangat kecil, yaitu hanya 4,41%.

Dari Tabel 3.6 diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Bintan yang memiliki Angka DR tertinggi adalah Kecamatan Gunung Kijang, yaitu 46,09. Ini berarti di Kecamatan Gunung Kijang ada 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 46 orang penduduk usia non produktif.

### **3. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

Informasi tentang perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari



informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya, berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan usia dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan orang tua dalam pengasuhan anak, serta kurang matangnya tingkat emosional pasangan pada saat harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya, suatu daerah dengan





proporsi kawin yang tinggi, cenderung menaikkan angka kelahiran. Tabel 3.7 menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin pada penduduk Kabupaten Bintan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Bintan didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 49,54 persen, diikuti dengan status kawin sebanyak 44,45 persen, cerai mati 3,93 persen, dan cerai hidup 2,08 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin dan belum kawin lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin disebabkan biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarganya mempunyai keinginan mapan terlebih dahulu secara



ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Status Perkawinan dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Status Perkawinan	Jenis Kelamin				Total	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum Kawin	47.693	27,12	39.432	22,42	87.125	49,54
2	Kawin	39.147	22,26	39.029	22,19	78.176	44,45
3	Cerai Hidup	1.679	0,95	1.982	1,13	3.661	2,08
4	Cerai Mati	1.629	0,93	5.282	3,00	6.911	3,93
TOTAL		90.148	51,26	85.725	48,74	175.873	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten  
Bintan**

Menarik untuk dicermati bahwa pada status cerai, proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena cerai hidup maupun karena ditinggal



meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Besarnya persentase penduduk perempuan yang cerai hidup dibandingkan laki-laki, diduga berhubungan dengan kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai. Jika status kawin dikaitkan dengan umur, nampak bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 0-24 tahun, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 25-59 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka

yang berstatus bekerja dan berkeinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

**Tabel 3.8**  
**Jumah dan Proporsi Penduduk Menurut**  
**Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bintang Tahun 2023**

No.	Kelompok Umur	Status Perkawinan							
		Belum Kawin		Kawin		Ceraai Hidup		Ceraai Mati	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	0 - 4	13.073	7,43	-	-	-	-	-	-
2	5 - 9	15.720	8,94	-	-	-	-	-	-
3	10-14	17.228	9,80	-	-	-	-	-	-
4	15-19	14.712	8,37	93	0,05	1	0,00	-	-
5	20-24	13.177	7,49	2.161	1,23	62	0,04	4	0,00
6	25-29	5.935	3,37	6.982	3,97	188	0,11	25	0,01
7	30-34	2.294	1,30	9.592	5,45	348	0,20	49	0,03
8	35-39	1.429	0,81	11.546	6,56	486	0,28	130	0,07
9	40-44	1.159	0,66	13.652	7,76	702	0,40	315	0,18
10	45-49	846	0,48	11.574	6,58	630	0,36	471	0,27
11	50-54	590	0,34	8.869	5,04	503	0,29	650	0,37
12	55-59	406	0,23	5.894	3,35	320	0,18	896	0,51
13	60-64	238	0,14	3.791	2,16	213	0,12	1.158	0,66
14	65-69	155	0,09	2.073	1,18	126	0,07	1.103	0,63
15	70-74	96	0,05	1.045	0,59	47	0,03	884	0,50
16	75+	67	0,04	904	0,51	35	0,02	1.226	0,70
TOTAL		87.125	49,54	78.176	44,45	3.661	2,08	6.911	3,93

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk di Kabupaten Bintan yang berstatus cerai hidup tertinggi terdapat di kelompok usia 30-54 tahun, sedangkan proporsi penduduk yang berstatus cerai mati mulai banyak ditemukan di usia 55 tahun keatas.

#### **a. Angka Perkawinan Kasar**

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang



sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Usia produktif/usia subur yang berkaitan dengan kelahiran adalah terdapat pada wanita usia 15-49 tahun. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak, karena belum organ reproduksi dan kekurangsiapan secara mental menghadapi masa kehamilan/ melahirkan. Demikian pula sebaliknya semakin tua usia saat perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Perkawinan juga merupakan salah satu variabel antara yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesuburan/fertilitas, antara lain melalui pendek dan panjangnya usia subur yang dilalui Pasangan Usia Subur (PUS) yang menentukan banyaknya



kelahiran. Dengan demikian perkawinan juga secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Perkawinan merupakan suatu perubahan status, misal perubahan dari status “Belum Kawin” menjadi status “Kawin”. Angka perkawinan kasar adalah persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perhitungan angka ini adalah menggunakan data banyaknya perkawinan yang terjadi pada waktu tertentu termasuk di dalamnya perkawinan pertama dan perkawinan ulang, jadi bukan banyaknya penduduk yang berstatus kawin.

Meskipun perhitungan angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di suatu wilayah. Selain itu, indikator ini masih dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan

pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga dan lain-lain.

**Tabel 3.9**  
**Angka Perkawinan Kasar (APK) per Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Penduduk Status Kawin	Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Perkawinan Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	7.601	17.583	432,29
2.	Bintan Timur	22.343	50.472	442,68
3.	Bintan Utara	10.911	24.941	437,47
4.	Teluk Bintan	5.486	11.875	461,98
5.	Tambelan	2.358	5.228	451,03
6.	Teluk Sebong	8.663	19.558	442,94
7.	Toapaya	6.599	14.641	450,72
8.	Mantang	2.185	4.612	473,76
9.	Bintan Pesisir	3.176	7.015	452,74
10.	Seri Kuala Lobam	8.854	19.948	443,85
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>78.176</b>	<b>175.873</b>	<b>444,50</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**





Jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebanyak 175.873 orang, dan jumlah penduduk WNI yang berstatus kawin di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 78.176 orang. Dengan demikian, angka perkawinan kasar di Kabupaten Bintan adalah 444,50. Artinya, dari 1000 penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2023, terdapat 445 orang yang berstatus kawin.

#### **b. Angka Perceraian Kasar**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti: kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh



hukum yang berlaku. Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 3.10

Angka Perceraian Kasar per Kecamatan  
 di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk Status Cerai Hidup	Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Perceraian Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	425	17.583	24,17
2.	Bintan Timur	1.192	50.472	23,62
3.	Bintan Utara	609	24.941	24,42
4.	Teluk Bintan	219	11.875	18,44
5.	Tambelan	87	5.228	16,64
6.	Teluk Sebong	357	19.558	18,25
7.	Toapaya	346	14.641	23,63
8.	Mantang	54	4.612	11,71
9.	Bintan Pesisir	115	7.015	16,39
10.	Seri Kuala Lobam	257	19.948	12,88
KABUPATEN BINTAN		3.661	175.873	20,82

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

Jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebanyak 175.873 orang, dan jumlah



penduduk WNI yang berstatus cerai hidup di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.661 orang. Dengan demikian, angka perkawinan kasar di Kabupaten Bintan adalah 20,82. Artinya, dari 1000 penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2023, terdapat 21 orang yang berstatus cerai hidup.

#### **4. Keluarga**

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak



hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

#### **a. Jumlah Keluarga dan rata-rata Jumlah Anggota Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terkait dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, Keluarga Berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).

Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat



kesejahteraannya. Jumlah keluarga di Kabupaten Bintan sebanyak 53.559. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bintan sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Bintan lebih banyak merupakan keluarga inti, begitu pula apabila kita perhatikan di setiap kecamatan di Kabupaten Bintan.

Besarnya jumlah keluarga juga menginformasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk disuatu daerah juga tinggi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam jangka waktu tertentu penduduk tersebut memerlukan berbagai sarana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sarana kesehatan, sarana pendidikan, sampai penyediaan lapangan pekerjaan akan semakin banyak.

Banyaknya anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat



menjadi bonus demografi bagi kemajuan suatu daerah. Akan tetapi bonus demografi juga akan menjadi bumerang bagi daerah tertentu. Pesatnya pertumbuhan penduduk jika dibarengi dengan perencanaan pembangunan yang mengacu pada peningkatan kualitas penduduk tentunya menjadi bonus demografi. Akan tetapi jika pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang baik, justru bonus demografi tersebut menjadi hal yang tidak menguntungkan. Akan muncul tingkat ketergantungan penduduk khususnya penduduk usia produktif sehingga menjadi beban bagi pemerintah. Tabel 3.11 berikut memperlihatkan rata-rata anggota keluarga sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Anggota**  
**Keluarga (RAK) per Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga		RAK
			Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gunung Kijang	17.583	5.270	29,97	3,34
2.	Bintan Timur	50.472	15.593	30,89	3,24
3.	Bintan Utara	24.941	7.679	30,79	3,25
4.	Teluk Bintan	11.875	3.717	31,30	3,19
5.	Tambelan	5.228	1.645	31,47	3,18
6.	Teluk Sebong	19.558	5.889	30,11	3,32
7.	Toapaya	14.641	4.581	31,29	3,20
8.	Mantang	4.612	1.379	29,90	3,34
9.	Bintan Pesisir	7.015	2.150	30,65	3,26
10.	Seri Kuala Lobam	19.948	5.656	28,35	3,53
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>175.873</b>	<b>53.559</b>	<b>30,45</b>	<b>3,28</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Informasi mengenai jumlah rata-rata anggota keluarga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) atau dapat pula digunakan





dalam menyusun perencanaan dibidang permukiman dan tata ruang di kecamatan, kabupaten/kota ataupun provinsi, diantaranya untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, membangun fasilitas dan layanan umum yang seharusnya tersedia seperti rumah sakit, taman bermain atau tempat rekreasi, dan lain-lain.

#### **b. Kepala Keluarga Berdasarkan Umur**

Data kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin diperlukan dalam melihat komposisi keluarga dalam kelompok usia produktif (15-64 Tahun) atau keluarga dengan kepala keluarga dengan usia tua (manula). Kelompok umur dengan jumlah kepala keluarga tertinggi ada di rentang usia 40-44 dengan jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 7.138 orang dan kepala



keluarga perempuan sebanyak 989 orang dengan total sebanyak 8.127. Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa ada kepala keluarga berada pada kelompok usia yang masih muda yaitu dibawah usia 20 tahun. kelompok yang menjadi kepala keluarga dengan usia dibawah 20 tahun yaitu usia 15-19 tahun. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga usia di bawah 20 tahun berjumlah 47 orang dan kepala keluarga perempuan berjumlah 43 dengan total kepala keluarga berusia dibawah 20 tahun sejumlah 90.



**Tabel 3.12**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok**  
**Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten**  
**Bintan Tahun 2023**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0 - 4	0	0	0
2	5 - 9	1	1	2
3	10-14	0	0	0
4	15-19	46	42	88
5	20-24	851	229	1.080
6	25-29	3.025	343	3.368
7	30-34	4.809	467	5.276
8	35-39	5.937	609	6.546
9	40-44	7.138	989	8.127
10	45-49	6.646	1.006	7.652
11	50-54	5.555	975	6.530
12	55-59	3.979	1.007	4.986
13	60-64	2.775	1.084	3.859
14	65-69	1.638	976	2.614
15	70-74	956	704	1.660
16	75+	972	799	1.771
TOTAL		44.328	9.231	53.559

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Meningkatnya kepala keluarga yang berusia di bawah 20 tahun dapat disebabkan karena beberapa hal:

1. Orang tua dari anak-anak tersebut sudah tidak ada, baik itu karena kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada ditempat lain dikarenakan sudah berpisah.
2. Kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya, sementara tidak ada orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini menjadikan anak yang paling tua yang berjenis kelamin laki-laki dijadikan kepala keluarga.
3. Kedua orang tua tidak berada dekat dengan anak-anak tetapi masih ada anggota keluarga dekat tetapi sudah tidak satu rumah atau dapur. Hal ini mengakibatkan anak-anak mempunyai



dapur sendiri dan membentuk keluarga yang terpisah dengan keluarga besarnya.

4. Ada sebagian kecil anak laki-laki yang masih dibawah umur tetapi sudah melangsungkan pernikahan sehingga membentuk keluarga sendiri.
5. Anak tersebut merantau dan berpisah dengan keluarga dan membentuk keluarga sendiri.

### c. Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 3.13**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No. Kabupaten/Kota		Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gunung Kijang	4.406	8,23	864	1,61	5.270	9,84
2.	Bintan Timur	12.717	23,74	2.876	5,37	15.593	29,11
3.	Bintan Utara	6.150	11,48	1.529	2,85	7.679	14,34
4.	Teluk Bintan	3.102	5,79	615	1,15	3.717	6,94
5.	Tambelan	1.324	2,47	321	0,60	1.645	3,07
6.	Teluk Sebong	4.930	9,20	959	1,79	5.889	11,00
7.	Toapaya	3.778	7,05	803	1,50	4.581	8,55
8.	Mantang	1.211	2,26	168	0,31	1.379	2,57
9.	Bintan Pesisir	1.809	3,38	341	0,64	2.150	4,01
10.	Seri Kuala Lobam	4.901	9,15	755	1,41	5.656	10,56
TOTAL		44.328	82,76	9.231	17,24	53.559	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Masih adanya kepala keluarga perempuan dalam jumlah yang cukup banyak menunjukkan bahwa di Kabupaten Bintan ada keluarga yang harus dikepalai keluarga oleh perempuan, hal ini dapat disebabkan:

- a) Keluarga tersebut terpisah dari laki-laki yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Perpisahan ini dapat terjadi karena mempunyai tempat tinggal yang jauh sehingga membentuk keluarga sendiri-sendiri. Perpisahan tersebut juga dapat terjadi karena perceraian baik itu pisah cerai hidup maupun cerai mati sehingga perempuan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga.
- b) Di Kabupaten Bintan memungkinkan terdapat perempuan yang merantau sendiri baik itu sebagai tenaga kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan, untuk mempunyai keluarga sendiri. Dengan demikian, seorang perempuan



yang merantau menjadi kepala keluarga. Jika dalam kumpulan para pendatang tidak ada laki-laki, maka perempuan akan mengambil alih sebagai kepala keluarga.

### **c. Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan**

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkandengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia dapat digunakan untuk menunjukan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota keluarganya.





Tabel 3.14 di bawah menyajikan jumlah dan persentase kepala keluarga menurut pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel tersebut tampak komposisi yang paling tinggi untuk pendidikan akhir yang dicapai kepala keluarga adalah SLTA/ sederajat dengan angka 33,51% dari seluruh kepala keluarga yang ada di Kabupaten Bintan. Urutan kedua adalah Tamat SD/ Sederajat dengan angka 18,94% dan ketiga adalah Tidak/ Belum Sekolah dengan angka 16,56%.

**Tabel 3.14**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan**  
**Status Pendidikan di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2023**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tidak/Belum Sekolah	6.610	12,34	2.257	4,21	8.867	16,56
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	4.014	7,49	1.335	2,49	5.349	9,99
3.	Tamat SD/Sederajat	7.969	14,88	2.177	4,06	10.146	18,94
4.	SLTP/Sederajat	6.046	11,29	1.001	1,87	7.047	13,16
5.	SLTA/Sederajat	16.028	29,93	1.922	3,59	17.950	33,51
6.	Diploma I/II	343	0,64	86	0,16	429	0,80
7.	Akademi/Dipl.III/S. Muda	861	1,61	137	0,26	998	1,86
8.	Diploma IV/Strata I	2.357	4,40	303	0,57	2.660	4,97
9.	Strata-II	96	0,18	13	0,02	109	0,20
10.	Strata-III	4	0,01	-	0,00	4	0,01
TOTAL		44.328	82,76	9.231	17,24	53.559	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Jika dilihat dari jumlah kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah (Tamat SD ke bawah), maka jumlah kepala keluarga dengan Tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Bintan sebanyak 24.362 orang.



Masih adanya kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah dapat dikarenakan:

- 1) Kepala keluarga tersebut memang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan usia kepala keluarga tersebut telah berusia tua.
- 2) Kepala keluarga tersebut masih belum menyelesaikan pendidikan akan tetapi karena faktor tertentu mengharuskan penduduk tersebut menjadi kepala keluarga.
- 3) Kepala keluarga tersebut tinggal sendiri karena sedang melanjutkan pendidikannya.

#### **e. Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan**

Informasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting terutama dalam program pengentasan



kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tabel 3.15 di bawah menunjukkan jumlah dan proporsi kepala keluarga menurut kelompok pekerjaan. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bintan mempunyai pekerjaan yang cukup beragam. Akan tetapi, pekerjaan penduduk Kabupaten Bintan paling banyak adalah nelayan. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Bintan yang dikelilingi oleh laut, sehingga penduduk Kabupaten Bintan terlebih yang tinggal di wilayah pesisir, banyak yang bekerja sebagai nelayan.

**Tabel 3.15**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belum/Tidak Bekerja	790	1,50	332	0,63	1.122	2,13
2.	Aparatur/Pejabat Negara	1.579	3,00	158	0,30	1.737	3,30
3.	Tenaga Pengajar	264	0,50	81	0,15	345	0,66
4.	Wiraswasta	4.136	7,87	189	0,36	4.325	8,23
5.	Pertanian/Peternakan	2.957	5,63	102	0,19	3.059	5,82
6.	Nelayan	7.554	14,37	9	0,02	7.563	14,39
7.	Agama dan Kepercayaan	49	0,09	1	0,00	50	0,10
8.	Pelajar/Mahasiswa	104	0,20	66	0,13	170	0,32
9.	Tenaga Kesehatan	51	0,10	26	0,05	77	0,15
10.	Pensiunan	609	1,16	83	0,16	692	1,32
11.	Lainnya	25.513	48,54	7.905	15,04	33.418	63,58
TOTAL		43.606	82,97	8.952	17,03	52.558	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

## 5. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

### a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Salah satu indikator kualitas dari penduduk adalah pendidikan yang telah ditempuh.



Semakin tinggi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk suatu wilayah, semakin maju wilayah tersebut dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, teknologi, dan kualitas hidup. Selain itu, tingkat kesadaran sosial dan kemampuan dalam menghadapi tantangan juga meningkat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Tabel 3.16 di bawah ini memperlihatkan Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bintan.

**Tabel 3.16**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tidak/Belum Sekolah	25.593	14,55	24.057	13,68	49.650	28,23
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	12.846	7,30	12.089	6,87	24.935	14,18
3.	Tamat SD/Sederajat	12.627	7,18	11.825	6,72	24.452	13,90
4.	SLTP/Sederajat	12.145	6,91	11.456	6,51	23.601	13,42
5.	SLTA/Sederajat	22.550	12,82	20.258	11,52	42.808	24,34
6.	Diploma I/II	430	0,24	585	0,33	1.015	0,58
7.	Akademi/Dipl.III/S. Muda	986	0,56	1.447	0,82	2.433	1,38
8.	Diploma IV/Strata I	2.859	1,63	3.918	2,23	6.777	3,85
9.	Strata-II	108	0,06	85	0,05	193	0,11
10.	Strata-III	4	0,00	5	0,00	9	0,01
TOTAL		90.148	51,26	85.725	48,74	175.873	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Jika diperhatikan menurut pendidikan akhir sesuai dengan data hasil registrasi kependudukan, Tingkat pendidikan di Kabupaten Bintan dapat dikatak masih tergolong berpendidikan rendah. Hal ini



terlihat dari persentase penduduk yang pendidikan akhirnya setingkat SLTP/ sederajat ke bawah sebanyak 69,73%. Sementara penduduk dengan pendidikan akhir SLTA/ sederajat sebesar 24,34%. Sisanya yaitu penduduk yang berpendidikan tinggi sebesar 5,93%.

Kualitas SDM sudah semestinya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang mumpuni maka akan berdampak buruk. Apalagi sekarang ini kita telah masuk masa persaingan bukan hanya dengan sesama saudara sebangsa namun juga dengan SDM asing. Persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja semakin ketat, peningkatan pendidikan perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar





peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, masyarakat Indonesia diharuskan memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Memeluk agama dan kepercayaan dari penduduk dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, dengan demikian setiap penduduk Indonesia dibebaskan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Untuk menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah, tentunya harus ditunjang dengan sarana peribadatan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan



prasarana peribadatan serta merencanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Selain itu informasi penduduk berdasarkan agama juga dapat digunakan untuk melihat potensi kerukunan kehidupan beragama dalam suatu daerah. Jika penduduk yang memeluk agama dalam suatu daerah relatif berimbang maka pada umumnya akan terjadi toleransi, akan tetapi jika ada dominasi pemeluk suatu agama maka sangat berpotensi rawan terjadinya konflik. Dengan adanya data jumlah penduduk berdasarkan agama maka dapat dibuat perencanaan pembangunan kerukunan beragama, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik agama.

Tabel 3.17 di bawah ini memperlihatkan data penduduk berdasarkan agama pada setiap kecamatan di Kabupaten Bintan.

Tabel 3.17

Jumlah Penduduk Menurut Agama per  
 Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Gunung Kijang	15.127	649	1.095	2	656	54	0	17.583
2.	Bintan Timur	44.910	1.783	871	11	2.887	4	6	50.472
3.	Bintan Utara	21.874	1.654	298	22	1.083	8	2	24.941
4.	Teluk Bintan	11.407	77	32	1	276	82	0	11.875
5.	Tambelan	5.218	0	2	0	7	1	0	5.228
6.	Teluk Sebong	16.100	1.223	910	45	1.021	259	0	19.558
7.	Toapaya	12.758	428	322	8	1.083	42	0	14.641
8.	Mantang	4.511	0	11	0	90	0	0	4.612
9.	Bintan Pesisir	6.649	35	29	0	301	1	0	7.015
10.	Seri Kuala Lobam	15.391	3.521	777	18	177	60	4	19.948
KABUPATEN BINTAN		153.945	9.370	4.347	107	7.581	511	12	175.873

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bintan di setiap kecamatannya didominasi oleh pemeluk Agama Islam. Hal tersebut dipengaruhi kuat oleh sejarah dan budaya yang berkembang di wilayah Kabupaten Bintan. Sejak masa lalu, Kabupaten Bintan merupakan bagian



dari jalur perdagangan internasional di Selat Malaka yang ramai, di mana para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh peran penting kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Kesultanan Johor-Riau-Lingga, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi. Selain itu, para ulama dan penyebar agama Islam berperan aktif dalam mengajarkan dan menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan agama. Budaya Melayu yang mendominasi wilayah ini juga sangat erat kaitannya dengan Islam, sehingga ajaran Islam tidak hanya menyebar secara spiritual tetapi juga menjadi bagian penting dari adat dan tradisi masyarakat.

Tabel 3.18 di bawah menyajikan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Bintan berdasarkan agama dan jenis kelamin.

**Tabel 3.18**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan**  
**Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Agama	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Islam	78.949	44,89	74.996	42,64	153.945	87,53
2	Kristen	4.746	2,70	4.624	2,63	9.370	5,33
3	Katolik	2.253	1,28	2.094	1,19	4.347	2,47
4	Hindu	54	0,03	53	0,03	107	0,06
5	Budha	3.869	2,20	3.712	2,11	7.581	4,31
6	Konghuchu	271	0,15	240	0,14	511	0,29
7	Lainnya	6	0,00	6	0,00	12	0,01
TOTAL		90.148	51,26	85.725	48,74	175.873	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

### c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas

Setiap manusia berkeinginan untuk dilahirkan dalam kondisi normal. Kenormalan ini berkaitan dengan berbagai kemudahan yang dapat dilakukan dalam



menjalani kehidupan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua manusia lahir dalam kondisi normal. Ada berbagai hambatan yang berupa disabilitas yang menghambat manusia untuk menjalankan kehidupannya. Data mengenai disabilitas yang dihadapi oleh penduduk sangat diperlukan. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang disabilitas dan jenis kedisabilitasnya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Selama ini kelompok penyandang disabilitas merasa didiskriminasikan, karena di berbagai tempat umum tidak tersedia jalan khusus untuk penggunaan kursi roda, toilet khusus untuk mereka dan lain sebagainya. Tabel 3.19 berikut memperlihatkan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Bintan berdasarkan jenis



disabilitas dan jenis kelamin pada tahun 2023.

**Tabel 3.19**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Kondisi Disabilitas dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Agama	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fisik	55	12,73	31	7,18	86	19,91
2	Netra	15	3,47	10	2,31	25	5,79
3	Rungu	45	10,42	42	9,72	87	20,14
4	Mental	113	26,16	65	15,05	178	41,20
5	Fisik dan Mental	13	3,01	11	2,55	24	5,56
6	Lainnya	16	3,70	16	3,70	32	7,41
TOTAL		257	59,49	175	40,51	432	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan

Penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebanyak 0,25% dari seluruh penduduk Kabupaten Bintan. Kondisi ini menunjukkan



bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bintan mempunyai kondisi fisik yang normal. Kondisi disabilitas yang paling banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Bintan adalah disabilitas mental dengan jumlah 178 orang.

Keberadaan penduduk difabel walaupun kecil secara persentasi, tetap harus menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini dikarenakan penduduk yang mengalami disabilitas memerlukan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan penduduk normal. Jika penduduk yang mengalami disabilitas tidak mendapatkan perhatian yang khusus dikhawatirkan akan menjadi beban bagi penduduk lainnya dan Pemerintah. Penduduk produktif yang menjadi beban bagi penduduk lainnya secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.





Informasi mengenai penduduk yang mengalami disabilitas ini menjadi penting. Oleh karena itu informasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang disabilitas), data tersebut masih memungkinkan lebih besar lagi secara faktual di lapangan karena saat pendaftaran masih dimungkinkan penduduk tidak mencantumkan jenis kecacatan yang dialaminya dikarenakan rasa malu atau karena faktor lainnya.

#### **d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah**

Golongan darah merupakan aspek penting yang melekat pada diri seseorang. Setiap manusia pasti memiliki golongan darah tertentu. Data Golongan Darah yang dicantumkan pada KTP sangat penting untuk



mengetahui dengan cepat golongan darah seseorang tanpa harus dicek terlebih dahulu. Namun sangat disayangkan, saat pendaftaran penduduk melalui SIAK, penduduk kerap kali abai dalam mengisi data golongan darah, sehingga data terkait golongan darah masih banyak yang tidak diketahui. Tabel 3.20 di bawah ini memperlihatkan jumlah penduduk berdasarkan golongan darah yang dimilikinya sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah**  
**dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2023**

No.	Golongan Darah	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A	2.180	1,24	2.217	1,26	4.397	2,50
2.	B	2.674	1,52	2.608	1,48	5.282	3,00
3.	AB	1.022	0,58	873	0,50	1.895	1,08
4.	O	6.344	3,61	5.365	3,05	11.709	6,66
5.	A+	119	0,07	101	0,06	220	0,13
6.	A-	5	0,00	9	0,01	14	0,01
7.	B+	92	0,05	103	0,06	195	0,11
8.	B-	8	0,00	5	0,00	13	0,01
9.	AB+	57	0,03	54	0,03	111	0,06
10.	AB-	20	0,01	15	0,01	35	0,02
11.	O+	115	0,07	108	0,06	223	0,13
12.	O-	91	0,05	90	0,05	181	0,10
13.	Tidak Tahu	77.421	44,02	74.177	42,18	151.598	86,20
<b>TOTAL</b>		<b>90.148</b>	<b>51,26</b>	<b>85.725</b>	<b>48,74</b>	<b>175.873</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Berdasarkan tabel 3.20 di atas, terlihat bahwa masih sangat banyak penduduk yang tidak mengetahui golongan darahnya. Hal ini dapat dilihat pada angka ketidaktahuan akan golongan darah yang 86,20%. Ketidaktahuan penduduk akan golongan darah yang dimilikinya disebabkan:

- a) Penduduk tidak pernah melakukan pemeriksaan golongan darah. Kondisi tersebut dikarenakan masyarakat tidak akan melakukan pemeriksaan golongan darah, jika tidak diperlukan.
- b) Pihak pemerintah juga kurang optimal menggunakan data tentang golongan darah, sehingga tidak dapat memaksa penduduk untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Rumah Sakit ataupun Puskesmas kerap tidak pernah menanyakan data golongan darah, kecuali dalam kondisi yang kritis yang membutuhkan donor darah. Sebetulnya

data golongan darah dari penduduk ini sangat penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi ketepatan keputusan medis yang harus dilakukan, misalnya terkait dengan suplai darah (transfusi). Selain itu jika data ini dapat diketahui oleh pihak sektor kesehatan, maka akan memudahkan siklus persediaan darah untuk tiap golongannya pada bank darah.

## **B. Kualitas Penduduk**

### **1. Kesehatan**

Dalam menentukan arah kebijakan dibidang kesehatan setidaknya dibutuhkan data-data mengenai: Angka Kelahiran Kasar, Angka Kelahiran Umum, Angka Kelahiran Total, Angka Kelahiran Menurut Umur, Rasio Anak dan Perempuan, Angka Kematian Bayi dan Balita dan Angka Kematian Ibu.

#### **a. Kelahiran**



Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator-indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

#### **i. Angka Kelahiran Kasar**

Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/ CBR*) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk. Angka kelahiran hidup ini juga dapat menunjukkan tingkat kelahiran hidup dari suatu daerah. Selain itu, angka kelahiran hidup kasar juga dapat dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam bidang kesehatan. Hal ini berhubungan dengan kesehatan yang dimiliki oleh ibu dan bayi sewaktu dilahirkan.



Kelahiran hidup dari 1000 penduduk ini memperlihatkan bahwa dengan kesehatan yang baik maka bayi akan lahir hidup. Akan tetapi disisi lain, tingginya angka kelahiran hidup secara tidak langsung juga menjadi beban.

Hal ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang harus dilakukan, berkaitan dengan penyediaan sarana kesehatan untuk bayi- bayi yang dilahirkan, termasuk sarana pendidikan yang harus disediakan jika bayi yang lahir hidup tersebut telah mencapai usia sekolah. Selanjutnya menyediakan lapangan pekerjaan jika bayi yang lahir hidup tersebut telah masuk kelompok usia produktif.



Angka kelahiran bayi hidup juga menjadi salah satu permasalahan kependudukan. Kondisi ini berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika angka kelahiran bayi hidup ini dihubungkan dengan anggota keluarga dalam suatu keluarga juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yang bersangkutan. Banyaknya bayi yang lahir hidup dalam suatu keluarga akan menjadi beban keluarga yang bersangkutan.



**Tabel 3.21**  
**Jumlah Kelahiran dan Angka Kelahiran Kasar**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2023**

No. Kecamatan		Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	282	17.583	16,04
2.	Bintan Timur	738	50.472	14,62
3.	Bintan Utara	347	24.941	13,91
4.	Teluk Bintan	82	11.875	6,91
5.	Tambelan	65	5.228	12,43
6.	Teluk Sebong	304	19.558	15,54
7.	Toapaya	238	14.641	16,26
8.	Mantang	54	4.612	11,71
9.	Bintan Pesisir	91	7.015	12,97
10.	Seri Kuala Lobam	385	19.948	19,30
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>2.586</b>	<b>175.873</b>	<b>14,70</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Kriteria Angka Kelahiran Kasar (CBR)  
dapat dibedakan menjadi tiga  
macam, yaitu:



1.  $CBR < 20$ , termasuk kriteria rendah
  2.  $CBR$  antara  $20 - 30$ , termasuk kriteria sedang
  3.  $CBR > 30$ , termasuk kriteria tinggi
- Dengan demikian,  $CBR$  pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan rata-rata termasuk dalam kategori yang rendah. Berdasarkan Database SIAK Kabupaten Bintan, pada tahun 2023 di Kabupaten Bintan, angka kelahiran hidup di Kabupaten Bintan berjumlah 2.586 jiwa.

## ii. Angka Kelahiran Umum

Angka Kelahiran Umum atau *General Fertility Rate/GFR* adalah banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita yang berusia 15-49 tahun dalam satu tahun. Berikut adalah rumus menghitung Angka Kelahiran Umum:

$$GFR = \frac{\text{Jumlah Kelahiran}}{\text{Penduduk Wanita 15 – 49 Tahun}} \times 1000$$

- Jumlah Kelahiran = 2.586 jiwa
- Penduduk Wanita 15-49 tahun  
= 48.728 jiwa

Sehingga apabila dimasukkan dalam rumus, akan didapat angka GFR sebagai berikut:

$$GFR = \frac{2.586}{48.728} \times 1000 = 53,07$$

Angka 53,07 dapat dibulatkan menjadi 53, yang berarti bahwa setiap 1000 wanita yang berusia 15-49 tahun terdapat kelahiran sebanyak  $\pm$  53 orang.

### iii. Rasio Anak dan Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak dibawah lima tahun dengan jumlah penduduk



perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan diketahuinya jumlah kelahiran yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini maka akan terlihat kerapatan anak yang dilahirkan dalam suatu daerah tertentu.

Rasio anak dan perempuan juga dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana yang diperlukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu juga rasio anak dan perempuan ini juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan kependudukan bagi



suatu daerah. Tingginya angka rasio ini menunjukkan bahwa disuatu daerah tingkat kelahirannya masih tinggi. Oleh karena itu, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan yang berorientasi untuk menekan pertumbuhan penduduk. Demikian juga sebaliknya, jika rasio anak dengan perempuan tersebut maka ini menunjukkan bahwa laju pertambahan penduduknya rendah, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan untuk mempertahankan rasio tersebut. Tabel 3.22 memperlihatkan rasio anak dengan perempuan di Kabupaten Bintan sebagai berikut:



**Tabel 3.22**  
**Rasio Anak dan Perempuan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No. Kecamatan		Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun	Jumlah Penduduk Wanita Usia 15- 49 Tahun	Rasio Anak- Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	1.493	4.760	31,37
2.	Bintan Timur	3.634	13.539	26,84
3.	Bintan Utara	1.686	7.180	23,48
4.	Teluk Bintan	901	3.126	28,82
5.	Tambelan	349	1.418	24,61
6.	Teluk Sebong	1.409	5.511	25,57
7.	Toapaya	1.089	4.001	27,22
8.	Mantang	375	1.229	30,51
9.	Bintan Pesisir	486	1.853	26,23
10.	Seri Kuala Lobam	1.651	6.111	27,02
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>13.073</b>	<b>48.728</b>	<b>26,83</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Berdasarkan tabel 3.22 di atas,  
terlihat bahwa rasio anak dengan  
penduduk berjenis kelamin



perempuan adalah 27. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan berusia produktif terdapat 27 anak-anak berusia dibawah lima tahun. Dengan demikian, setiap 100 orang perempuan harus menanggung 27 orang anak dibawah lima tahun. Selain itu, berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Mantang merupakan daerah yang mempunyai rasio penduduk anak-anak dengan perempuan yang tertinggi di Kabupaten Bintan. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua daerah tersebut tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir paling tinggi di Kabupaten Bintan. Sementara itu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Tambelan merupakan



daerah yang mempunyai rasio anak dengan perempuan yang paling rendah di Kabupaten Bintan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di kedua daerah tersebut tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir cukup rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Kabupaten Bintan.

Bagi Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Mantang sejak saat ini harus sudah mulai memikirkan dan mempersiapkan berbagai pelayanan dengan baik, baik untuk pelayanan dalam jangka pendek maupun pelayanan dalam jangka panjang, sebagai upaya menyongsong pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di Kabupaten Bintan. Akan tetapi tidak menjadi terabaikan penyediaan sarana yang harus





dilakukan oleh Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Tambelan dengan rasio anak dan perempuan yang rendah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk bukan hanya dipengaruhi dengan kelahiran saja, tetapi juga migrasi yang mungkin saja membawa anak-anaknya.

## **b. Kematian**

Salah satu yang menjadi indikator dalam menentukan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal perkembangan penduduk adalah Angka Kematian yang terkait dengan Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Post Neonatal, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu. Tabel 3.23 adalah Angka Kematian dari berbagai aspek per kecamatan yang akan



### **i. Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen yang mempengaruhi kematian bayi dapat berupa penyakit yang dibawa sejak lahir, kekurangan gizi sewaktu ibu sedang mengandung. Faktor endogen ini sulit untuk dilacak secara kasat mata. Faktor endogen juga berkaitan dengan gaya hidup orang tua sebelum mengandung anak, bahkan gaya hidup sebelum kedua orang tua



melakukan perkawinan. Faktor endogen juga dapat saja disebabkan faktor keturunan yang mungkin saja ada jauh sebelum generasi saat ini.

Sementara itu faktor eksogen lebih berkaitan dengan lingkungan tempat bayi Atau keluarga tersebut berada. Kebersihan sewaktu persalinan, kebersihan sewaktu merawat, sampai asupan gizi setelah bayi dilahirkan menjadi faktor eksogen kematian bayi. Faktor eksogen juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dalam masyarakat. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan. Tingginya Angka Kematian Bayi menggambarkan bahwa pembangunan saat ini belum optimal menyentuh kualitas untuk bayi.



Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) ini yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor endogen dan faktor eksogen tadi. Pelayanan kesehatan ibu dan anak ini tidak hanya berkaitan dengan persalinan dan perawatan setelah bayi lahir. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi dimulai sebelum ibu mengandung. Kesiapan untuk mengandung haruslah sehat secara fisik dan mental. Demikian juga sewaktu mengandung perlu ada pelayanan yang dapat memastikan bahwa bayi yang dikandung beserta ibunya dalam keadaan sehat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terkait jumlah angka kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) pada Tahun 2023 adalah 14,7/1.000 KH,



artinya dari 1.000 bayi terdapat  $\pm 15$  bayi yang meninggal.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) secara umum di Kabupaten Bintan tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi di Kabupaten Bintan sudah baik. Selain itu juga pasangan yang akan mendapatkan bayi maupun telah melahirkan dapat merawatnya dengan baik.

Pelayanan terhadap ibu dan anak pasca kelahiran juga berpengaruh terhadap kematian bayi pasca dilahirkan. Sulitnya akses terhadap sarana kesehatan, perlengkapan yang minim, serta tidak adanya ahli yang membantu dalam persalinan menjadi salah satu faktor penyebab kematian bayi pasca dilahirkan. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena perbedaan kondisi dari



daerah yang ada di Kabupaten Bintan. Ada daerah-daerah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar serta adanya tenaga medis yang sesuai. Sementara masih ada daerah yang masih belum lengkap sarana pelayanan kesehatan khusus untuk melahirkan dan kurangnya tenaga medis yang dapat membantu proses kelahiran.

## **ii. Angka Kematian Neonatal**

Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dari Tabel 3.23 dapat diketahui rata-rata kematian neonatal di Kabupaten Bintan adalah sebesar 9,7. Artinya, kematian neonatal berjumlah  $\pm 10$  per 1000 kelahiran hidup.



### **iii. Angka Kematian Post Neonatal**

Angka Kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Dari Tabel 3.23 dapat diketahui rata-rata kematian Post Neonatal di Kabupaten Bintan adalah sebesar 5. Artinya, kematian Post Neonatal berjumlah  $\pm 5$  per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

### **iv. Angka Kematian Balita**

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia dibawah 5 (lima) tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah kematian balita rentang usia 1-4 tahun, sehingga perbandingannya pun dengan penduduk



balita 1-4 tahun. Angka kematian balita usia 1-4 tahun di Kabupaten Bintan adalah sebesar 0,4/1.000 KH. Artinya, kematian balita berjumlah  $\pm 1$  per 1000 penduduk balita usia 1-4 tahun.

#### **v. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Kematian ibu juga dapat disebabkan karena penyakit yang diderita oleh ibu sewaktu mengandung dan melahirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2023



menerangkan bahwa AKI berjumlah 154,70/100.000 KH. Artinya, kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan berjumlah  $\pm$  155 jiwa per 100.000 jiwa. Angka ini termasuk tinggi.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi. Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Jika semua ini dapat dilakukan dan tersedia,



maka angka kematian ibu sewaktu mengandung dan melahirkan dapat ditekan. Selain itu yang paling penting dalam keluarga itu sudah memahami penanganan kehamilan dan proses kelahiran. Hal ini berkaitan dengan tidak selalu persalinan dapat dilakukan di tempat persalinan.

## **2. Pendidikan**

Perkembangan derajat pendidikan penduduk Kabupaten Bintan ditunjukkan dengan menggunakan indikator pendidikan berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat penduduk Kabupaten Bintan, dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, perkembangan APK dan APM penduduk



Kabupaten Bintan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

#### **a. Angka Partisipasi Kasar**

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan Program Wajib Belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di



masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

Nilai APK yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di jenjang Sekolah Dasar atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk Sekolah Dasar. Masih adanya anak yang bersekolah di SD pada usia di atas 12 tahun dikarenakan:

- Akses terhadap sekolah khususnya SD secara geografis jauh sehingga orang tua merasa khawatir untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD pada usai yang semestinya.



- Faktor budaya. Pada budaya tertentu anak-anak dikatakan layak untuk sekolah di SD jika sudah mampu melakukan sesuatu. Demikian juga ada budaya yang mengharuskan anak-anak berhenti sekolah sementara, jika ada kegiatan yang mengharuskan keterlibatan semua anggota keluarga.
- Faktor ekonomi yang mengharuskan anak-anak bekerja atau membantu orang tua sehingga terlambat untuk memasuki sekolah.
- Ada hambatan tertentu yang memungkinkan anak-anak tidak masuk SD sesuai dengan kelompok umurnya.
- Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau



terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Tabel 3.24 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bintan 2019-2023**

Tahun	Tingkat Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/ MA/Paket C	
	(1)	(2)	(3)	(4)
2019	105,90	95,66	93,63	
2020	106,16	95,66	94,00	
2021	105,79	97,59	95,09	
2022	106,28	95,78	96,99	
2023	106,37	96,49	95,09	

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan**



Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bintan pada setiap tingkat pendidikan cukup berfluktuasi di setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah angka partisipasi kasarnya

#### **b. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni penting bagi pemerintah karena dengan adanya angka partisipasi murni ini Pemerintah dapat





membuat rencana pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kelompok umur dan jenjang pendidikan. Penentuan usia untuk masuk ke jenjang SD yaitu 7 tahun, menjadi acuan prediksi Angka Partisipasi Murni SD, usia SMP 13 Tahun dan SMA 16 Tahun. Tabel di bawah ini memperlihatkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bintan 2019-2023**

Tahun	Tingkat Pendidikan		
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	99,96	88,35	80,02
2020	99,63	89,10	80,83
2021	99,46	89,47	81,93
2022	99,19	86,76	73,54
2023	99,62	89,51	80,97

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan**



Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

### **3. Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam memahami struktur ekonomi dan sosial suatu wilayah. Data ini mencerminkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, jasa, dan lainnya. Informasi ini juga dapat



memberikan gambaran mengenai tingkat ketenagakerjaan, perkembangan ekonomi, serta distribusi sumber daya manusia di berbagai bidang pekerjaan. Berikut adalah tabel yang menyajikan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Bintan.

**Tabel 3.26**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin				TOTAL	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belum/Tidak Bekerja	21.510	12,23	19.225	10,93	40.735	23,16
2.	Aparatur/Pejabat Negara	1.721	0,98	1.038	0,59	2.759	1,57
3.	Tenaga Pengajar	320	0,18	725	0,41	1.045	0,59
4.	Wiraswasta	4.826	2,74	809	0,46	5.635	3,20
5.	Pertanian/Peternakan	2.568	1,46	197	0,11	2.765	1,57
6.	Nelayan	7.829	4,45	13	0,01	7.842	4,46
7.	Agama dan Kepercayaan	49	0,03	6	0,00	55	0,03
8.	Pelajar/Mahasiswa	18.603	10,58	17.423	9,91	36.026	20,48
9.	Tenaga Kesehatan	62	0,04	333	0,19	395	0,22
10.	Pensiunan	623	0,35	6	0,00	629	0,36
11.	Lainnya	32.037	18,22	45.950	26,13	77.987	44,34
TOTAL		90.148	51,26	85.725	48,74	175.873	100,00

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bintan mempunyai pekerjaan yang cukup beragam, namun jumlah penduduk paling banyak justru berada pada jenis pekerjaan lainnya. Penduduk yang mempunyai pekerjaan dengan keterangan lainnya, merupakan penduduk yang saat ini tidak bekerja, bekerja serabutan dan mengurus rumah tangga. Penduduk yang baru berhenti bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru mencantumkan status pekerjaannya dengan lainnya. Demikian pula halnya dengan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan.

### **C. Mobilitas**

Salah satu faktor dalam menganalisis perkembangan penduduk suatu wilayah selain kuantitas dan kualitas penduduk yang ditinjau dari berbagai indikator yakni kesehatan, ekonomi dan sosial, yang tak kalah pentingnya



adalah data terkait Mobilitas Penduduk atau dikenal dengan istilah Migrasi Penduduk. Dalam bidang Administrasi Kependudukan dikenal dengan istilah Pindah dan Datang. Pada sub-Bab Mobilitas Penduduk ini akan dibahas terlebih dahulu dari kedatangan penduduk ke wilayah Kabupaten Bintan baik akibat dari perpindahan Kabupaten/Kota yang masih di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang datang dari luar Provinsi Kepulauan Riau.

## **1. Migrasi Masuk**

Migrasi masuk merupakan salah satu komponen penting dalam dinamika kependudukan yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Fenomena ini terjadi ketika individu atau kelompok penduduk berpindah dari daerah lain untuk menetap di wilayah tujuan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peluang ekonomi,



akses pendidikan, atau alasan sosial lainnya. Data migrasi masuk memberikan gambaran tentang seberapa besar daya tarik suatu wilayah bagi pendatang, serta dampaknya terhadap komposisi penduduk dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah migrasi masuk penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.



**Tabel 3.27**  
**Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Bintan Tahun 2023**

No. Kecamatan		Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	199	670	869
2.	Bintan Timur	488	1.587	2.075
3.	Bintan Utara	251	967	1.218
4.	Teluk Bintan	53	171	224
5.	Tambelan	28	99	127
6.	Teluk Sebong	200	646	846
7.	Toapaya	200	610	810
8.	Mantang	21	65	86
9.	Bintan Pesisir	46	109	155
10.	Seri Kuala Lobam	211	867	1.078
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>1.697</b>	<b>5.791</b>	<b>7.488</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Migrasi masuk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 berjumlah 7.488 jiwa, didominasi oleh Kecamatan Bintan timur,



Bintan Utara, dan Seri Kuala Lobam. Migrasi masuk ke Kabupaten Bintan, khususnya pada ketiga kecamatan tersebut, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Berikut beberapa penyebab yang mungkin mendorong migrasi masuk ke kecamatan-kecamatan tersebut:

a. Peluang Ekonomi dan Industri

- Bintan Industrial Estate (BIE): Kawasan industri seperti BIE di Seri Kuala Lobam merupakan salah satu daya tarik utama bagi migrasi masuk, terutama bagi pekerja yang mencari pekerjaan di sektor manufaktur, perakitan, dan industri lainnya. Pabrik dan fasilitas produksi besar sering kali membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak,





yang memicu migrasi masuk ke daerah ini.

- Pelabuhan dan Aktivitas Ekspor-Import: Bintan Utara memiliki akses yang strategis dengan keberadaan pelabuhan yang mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor-impor. Banyak penduduk yang berpindah ke sini untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi terkait logistik dan perdagangan internasional.

b. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas

- Pembangunan Infrastruktur: Perkembangan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, serta jaringan transportasi di Bintan Timur, telah meningkatkan aksesibilitas wilayah ini. Hal ini mendorong orang untuk bermigrasi



karena infrastruktur yang baik memfasilitasi mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.

- Perumahan dan Permukiman: Adanya pengembangan perumahan di kawasan ini bisa menjadi faktor lain. Dengan semakin berkembangnya wilayah ini sebagai area suburban yang lebih modern dan terjangkau, penduduk dari daerah lain bisa tertarik untuk pindah.

c. Pertumbuhan Sektor Pariwisata

- Destinasi Wisata: Kabupaten Bintan, termasuk Bintan Timur dan Bintan Utara, memiliki potensi pariwisata yang besar. Adanya investasi dalam sektor pariwisata, seperti resort dan fasilitas wisata lainnya, sering kali menarik migrasi masuk, terutama pekerja yang



terlibat di sektor ini. Peluang kerja di sektor perhotelan, kuliner, dan jasa wisata turut mendorong migrasi penduduk ke kecamatan tersebut.

d. Peluang Usaha dan Bisnis

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Bintan merupakan salah satu daerah dengan status KEK, yang memungkinkan investasi besar-besaran dan pengembangan ekonomi yang lebih cepat. Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam dapat menarik migrasi karena kemudahan dalam berbisnis dan potensi usaha, terutama bagi pengusaha atau investor kecil menengah yang mencari peluang di kawasan yang berkembang pesat ini.

e. Fasilitas Sosial dan Pendidikan



- Akses Pendidikan dan Kesehatan: Di beberapa kecamatan seperti Bintan Timur, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibanding daerah pedesaan bisa menjadi alasan penduduk dari wilayah lain, terutama dari daerah terpencil, memilih untuk bermigrasi. Akses ke sekolah, perguruan tinggi, atau layanan kesehatan menjadi pertimbangan penting bagi keluarga yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Pengembangan Kawasan Hunian Baru
  - Permukiman Baru: Dengan pengembangan permukiman atau hunian baru di kecamatan tersebut, sering kali terjadi migrasi masuk dari penduduk yang mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau atau lebih dekat dengan tempat kerja.



g. Perpindahan Aparatur Negara atau Karyawan

- Tugas Pekerjaan atau Penempatan Baru: Banyak aparatur negara, karyawan perusahaan, dan pekerja industri yang mungkin dipindahkan atau ditempatkan di kecamatan-kecamatan ini karena adanya ekspansi perusahaan, proyek industri, atau program pemerintah yang menuntut keberadaan tenaga kerja atau staf baru di lokasi tersebut.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan dan membentuk daya tarik wilayah-wilayah tersebut bagi pendatang yang ingin memanfaatkan peluang ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Bintan.



## **2. Migrasi Keluar**

Migrasi keluar penduduk adalah fenomena di mana individu atau kelompok meninggalkan wilayah asalnya untuk menetap di daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Alasan utama terjadinya migrasi keluar biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, seperti mencari pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, atau kondisi sosial yang lebih stabil. Selain itu, perpindahan penduduk juga bisa dipicu oleh faktor lingkungan atau bencana alam yang memaksa mereka untuk mencari tempat tinggal baru. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah migrasi keluar penduduk dari Kabupaten Bintan pada tahun 2023.



**Tabel 3.28**  
**Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No. Kecamatan		Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunung Kijang	334	337	671
2.	Bintan Timur	828	863	1.691
3.	Bintan Utara	547	561	1.108
4.	Teluk Bintan	137	141	278
5.	Tambelan	78	118	196
6.	Teluk Sebong	373	345	718
7.	Toapaya	269	275	544
8.	Mantang	50	54	104
9.	Bintan Pesisir	152	175	327
10.	Seri Kuala Lobam	472	522	994
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>3.240</b>	<b>3.391</b>	<b>6.631</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Data Migrasi Keluar di Kabupaten Bintan tidak terlalu berbeda dengan Migrasi Masuk pada tabel sebelumnya. Terlihat hampir



berimbang jumlahnya, yakni 6.631 orang selama periode Januari hingga Desember tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya migrasi keluar di Kabupaten Bintan mungkin saja dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Penduduk kembali ke tempat asal karena tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.
- b. Penduduk ke tempat asal karena telah menyelesaikan kontrak kerjanya.
- c. Penduduk tersebut keluar dari Kabupaten Bintan karena dialihtugaskan ke tempat lain.



## **BAB VI**

### **DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Dokumen kependudukan merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia. Dokumen tersebut selain sebagai bukti status legal seseorang, juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah, dan lain-lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai instansi pelaksana yang diamanatkan oleh Undang Undang Administrasi Kependudukan, selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan fungsi stelsel aktif petugas dalam melayani masyarakat sebagai Warga Negara untuk memiliki dokumen kependudukan tersebut.

Adapun Dokumen Kependudukan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah/Datang bagi penduduk yang pindah domisili dan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan lain-lain).

#### **A. Kepemilikan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah/keluarga tersebut. Kartu Keluarga yang dimaksud adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan melalui SIAK dengan nomor KK yang terdiri atas komposisi 6 digit Awal Kode Wilayah domisili, 6 digit berikutnya tanggal pembuatan KK, dan 4 digit terakhir



adalah nomor urut penerbitan di hari yang sama. Tabel 4.1 di bawah ini memperlihatkan jumlah kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan**  
**Kepemilikan Kartu Keluarga Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Kepemilikan Kartu Keluarga				Jumlah Kepala Keluarga
		Sudah Memiliki		Belum Memiliki		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gunung Kijang	5.244	9,79	26	0,05	5.270
2.	Bintan Timur	15.531	29,00	62	0,12	15.593
3.	Bintan Utara	7.660	14,30	19	0,04	7.679
4.	Teluk Bintan	3.712	6,93	5	0,01	3.717
5.	Tambelan	1.629	3,04	16	0,03	1.645
6.	Teluk Sebong	5.862	10,94	27	0,05	5.889
7.	Toapaya	4.566	8,53	15	0,03	4.581
8.	Mantang	1.378	2,57	1	0,00	1.379
9.	Bintan Pesisir	2.141	4,00	9	0,02	2.150
10.	Seri Kuala Lobam	5.635	10,52	21	0,04	5.656
KABUPATEN BINTAN		53.358	99,62	201	0,38	53.559

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bintan yang telah mempunyai Kartu Keluarga pada Tahun 2023 sebanyak 53.358 keluarga.

## **B. Kepemilikan KTP Elektronik**

Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el) merupakan selain Hak Warga Negara, juga merupakan syarat untuk menikmati layanan pelayanan publik. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019.



**Gambar 4.1**  
**Definisi dan Manfaat KTP Elektronik**

Di Indonesia sendiri dikenal dengan jargon yang diusung dalam program KTP-el adalah 1 (satu) KTP 1 (satu) Identitas atau pada dunia internasional dikenal dengan istilah *Single Identity Number* (SIN) yang mengantarkan masyarakat untuk memiliki identitas tunggal. Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan jumlah kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.



**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan**  
**KTP-el Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2023**

No. Kecamatan		Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk WKTP	Sudah Rekam KTP-el	% Penduduk Sudah Rekam KTP-el	Belum Rekam KTP-el
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gunung Kijang	17.583	12.396	12.150	98,02	246
2.	Bintan Timur	50.472	36.974	36.235	98,00	739
3.	Bintan Utara	24.941	18.305	17.950	98,06	355
4.	Teluk Bintan	11.875	8.610	8.448	98,12	162
5.	Tambelan	5.228	3.822	3.743	97,93	79
6.	Teluk Sebong	19.558	14.028	13.742	97,96	286
7.	Toapaya	14.641	10.656	10.448	98,05	208
8.	Mantang	4.612	3.263	3.189	97,73	74
9.	Bintan Pesisir	7.015	5.017	4.902	97,71	115
10.	Seri Kuala Lobam	19.948	13.676	13.323	97,42	353
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>175.873</b>	<b>126.747</b>	<b>124.130</b>	<b>97,94</b>	<b>2.617</b>

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa sudah banyak penduduk Kabupaten Bintan yang sudah melakukan perekaman, yaitu sebanyak 124.130 orang atau 97,94%, menyisakan 2,06

% atau sekitar 2.617 orang penduduk Kabupaten Bintan yang belum melakukan perekaman. Diantaranya sudah melakukan perekaman namun belum di cetak karena masih dalam daftar antrian cetak di Kabupaten/Kota masing-masing. Alangkah efektif dan efisiennya ketika seluruh penduduk telah memiliki KTPel dan seluruh pelayanan publik menyesuaikan prosedur pelayanannya dengan mewajibkan identitasnya adalah melalui NIK KTP-el, sebagaimana yang telah dilakukan diberbagai sektor diantaranya Perbankan, Jaminan Sosial (BPJS), Pajak, dan lain sebagainya.

### **C. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**

Akta Pencatatan Sipil merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang orang



yang lain. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat dalam Database SIAK antara lain:

### **1. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi bukti sah mengenai kelahiran seseorang. Akta ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan resmi atas keberadaan seseorang oleh negara, tetapi juga menjadi syarat dalam berbagai proses administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan kartu identitas, hingga pengurusan hak waris. Oleh karena itu, memiliki akta kelahiran menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu.

Di Kabupaten Bintan, perhatian terhadap kepemilikan akta kelahiran terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah dalam mempermudah proses pembuatan akta kelahiran. Tabel 4.3





di bawah ini menyajikan data mengenai jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bintan pada tahun 2023.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No. Kecamatan		Jumlah Penduduk 0-18 Tahun	Belum Memiliki Akte Kelahiran	Memiliki Akte Kelahiran	% Kepemilikan Akte Kelahiran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gunung Kijang	6.008	535	5.473	91,10
2.	Bintan Timur	15.956	1.441	14.515	90,97
3.	Bintan Utara	7.895	813	7.082	89,70
4.	Teluk Bintan	3.787	248	3.539	93,45
5.	Tambelan	1.675	228	1.447	86,39
6.	Teluk Sebong	6.488	582	5.906	91,03
7.	Toapaya	4.656	463	4.193	90,06
8.	Mantang	1.569	88	1.481	94,39
9.	Bintan Pesisir	2.340	218	2.122	90,68
10.	Seri Kuala Lobam	7.296	835	6.461	88,56
KABUPATEN BINTAN		57.670	5.451	52.219	90,55

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Akta kelahiran merupakan identitas awal yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi dasar hukum keperdataan seseorang dengan orang tuanya. Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk berusia 0-18 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 telah mencapai 90,55%.

## **2. Akta Perkawinan**

Akta perkawinan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti sah mengenai pernikahan yang telah dilangsungkan secara hukum. Akta ini berperan penting dalam pengakuan status pernikahan di mata negara, serta menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai hak-hak hukum, seperti pengurusan hak asuh anak, harta bersama, hingga keperluan administrasi lainnya. Di Kabupaten Bintan, tingkat kepemilikan akta perkawinan menjadi salah satu fokus dalam pencatatan



administrasi kependudukan, sebagaimana tercermin dalam data kepemilikan akta perkawinan pada tahun 2023 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Perkawinan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Kepemilikan Akta Perkawinan			
			Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gunung Kijang	7.599	7.011	92,26	588	7,74
2.	Bintan Timur	22.341	21.210	94,94	1.131	5,06
3.	Bintan Utara	10.910	10.236	93,82	674	6,18
4.	Teluk Bintan	5.485	4.715	85,96	770	14,04
5.	Tambelan	2.357	2.097	88,97	260	11,03
6.	Teluk Sebong	8.661	7.825	90,35	836	9,65
7.	Toapaya	6.597	6.035	91,48	562	8,52
8.	Mantang	2.179	2.034	93,35	145	6,65
9.	Bintan Pesisir	3.170	2.929	92,40	241	7,60
10.	Seri Kuala Lobam	8.851	8.324	94,05	527	5,95
KABUPATEN BINTAN		78.150	72.416	92,66	5.734	7,34

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**



Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non-muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan Buku Nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Tahun 2023 yang tercatat dalam *database* berjumlah 78.150 penduduk berstatus kawin dengan jumlah kepemilikan Akta Perkawinan berjumlah 72.416 (92,66 %) sedangkan yang belum memiliki Akta Perkawinan berjumlah 5.734 (7,34 %).

### **3. Akta Perceraian**

Akta perceraian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bukti sah mengenai berakhirnya ikatan pernikahan secara hukum. Dokumen ini sangat penting bagi pasangan yang telah



bercerai, karena menjadi dasar pengakuan status perpisahan mereka di mata negara dan memudahkan berbagai proses hukum selanjutnya, seperti pengurusan hak asuh anak, pembagian harta, dan hal-hal administratif lainnya. Kepemilikan akta perceraian juga melindungi hak-hak mantan pasangan suami istri secara legal dalam kehidupan sosial dan hukum.

Di Kabupaten Bintan, data tentang jumlah kepemilikan akta perceraian pada tahun 2023 memberikan gambaran mengenai tingkat pencatatan perceraian yang telah dilakukan di wilayah tersebut.



**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan**  
**Akte Perceraian Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Perceraian	Kepemilikan Akta Perceraian			
			Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gunung Kijang	425	370	87,06	55	12,94
2.	Bintan Timur	1.192	1.045	87,67	147	12,33
3.	Bintan Utara	609	541	88,83	68	11,17
4.	Teluk Bintan	219	191	87,21	28	12,79
5.	Tambelan	87	75	86,21	12	13,79
6.	Teluk Sebong	357	314	87,96	43	12,04
7.	Toapaya	345	301	87,25	44	12,75
8.	Mantang	54	48	88,89	6	11,11
9.	Bintan Pesisir	115	97	84,35	18	15,65
10.	Seri Kuala Lobam	257	229	89,11	28	10,89
KABUPATEN BINTAN		3.660	3.211	87,73	449	12,27

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Akte Perceraian merupakan identitas sebagai dasar hukum seseorang yang telah berpisah dengan pasangan resmi suami



isteri. Dengan akta ini seseorang sudah tidak memiliki hak saling menuntut satu sama lain berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Berdasarkan data Tabel 4.5 diatas, pada tahun 2023 yang tercatat dalam database berjumlah 3.660 penduduk yang melakukan perceraian dengan jumlah kepemilikan Akta Perceraian berjumlah 3.211 (87,73 %) sedangkan yang belum memiliki Akta Perceraian berjumlah 449 (12,27 %).

**4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)** KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Seluruh anak diharapkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kartu Identitas Anak, dengan tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang KIA, ada 2 jenis KIA, yakni:

- KIA untuk anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun.
- KIA untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.





**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk 0-17 Tahun Berdasarkan**  
**Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 0-17 Tahun	Kepemilikan KIA			
			Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gunung Kijang	5.499	2.257	41,04	3.242	58,96
2.	Bintan Timur	14.359	7.807	54,37	6.552	45,63
3.	Bintan Utara	7.047	4.340	61,59	2.707	38,41
4.	Teluk Bintan	3.459	2.069	59,81	1.390	40,19
5.	Tambelan	1.519	646	42,53	873	57,47
6.	Teluk Sebong	5.849	3.024	51,70	2.825	48,30
7.	Toapaya	4.237	2.367	55,86	1.870	44,14
8.	Mantang	1.433	859	59,94	574	40,06
9.	Bintan Pesisir	2.113	1.311	62,04	802	37,96
10.	Seri Kuala Lobam	6.627	2.817	42,51	3.810	57,49
KABUPATEN BINTAN		52.142	27.497	52,73	24.645	47,27

**Sumber: Data Konsolidasi Bersih SIAK Kabupaten Bintan**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk identitas diri



sebelum mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di usia dewasa. KIA memiliki peran penting dalam memperkuat administrasi kependudukan serta memudahkan anak dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Program kepemilikan KIA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan identitas sejak dini, sehingga anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Di Kabupaten Bintan, jumlah penduduk 0-17 tahun yang memiliki KIA hanya sebesar 52,73%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepemilikan KIA di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan lagi, karena masih ada sekitar 47,27% penduduk Kabupaten Bintan berusia 0-17 tahun yang belum memiliki KIA.



Meningkatkan kesadaran penduduk tentang pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dan pihak terkait perlu gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan kampanye langsung di komunitas. Informasi mengenai manfaat KIA, seperti kemudahan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum, harus disampaikan dengan jelas dan menarik. Kedua, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam memberikan edukasi dapat membantu menyebarkan pesan ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Ketiga, pemerintah dapat mempermudah proses pembuatan KIA dengan mengadakan layanan keliling atau membuka lebih banyak titik pelayanan di area terpencil. Dengan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses, diharapkan

kesadaran masyarakat untuk memiliki KIA bagi anak-anaknya dapat meningkat secara signifikan.

# **“Bintan Bangkit Ekonomi Pulih”**



**Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bintan**

